



# CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH T.A 2025

**KABUPATEN  
MOROWALI**

**2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmatNya sehingga penyusunan Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Morowali Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reviu laporan kinerja instansi pemerintah.

Capaian AKIP Kabupaten Morowali Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2029. Laporan ini merupakan wujud pertanggung jawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali dalam mengimplementasikan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan menciptakan Good Governance dan Clean Government.

Akhir kata, semoga Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Morowali Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Morowali, Maret 2026

Bupati Morowali,



**IKSAN**

## CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

### A. Target Kinerja dalam perjanjian kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan pembangunan daerah harus direncanakan secara terukur, dilaksanakan secara efektif, serta dievaluasi secara berkelanjutan guna memastikan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan.

Perjanjian Kinerja disusun sebagai bentuk kesepakatan kinerja antara Kepala Daerah dengan pimpinan perangkat daerah yang memuat target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Target kinerja tersebut ditetapkan secara terukur dan selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing perangkat daerah, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja secara objektif dan akuntabel

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target capaian kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Tabel 2.3  
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

TUJUAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembanunan Jaminan Sosial Yang Merata				
Indikator Kinerja			Satuan	Target
1.1	Angka Kemiskinan		%	11,58
1.1.1 Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin				
	1.1.1.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1,80
	1.1.1.2	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,52
	1.1.1.3	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,275

TUJUAN STRATEGIS II				
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Daya Saing Daerah				
Indikator Kinerja			Satuan	Target
2.1	Angka Pertumbuhan Ekonomi		%	25,00
2.1.1 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				
	2.1.1.1	Pendapatan Perkapita	Juta Rp	420
	2.1.1.2	Inflasi	%	2,00
2.1.2 Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dipasar Tenaga Kerja				
	2.1.2.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,00
2.1.3 Meningkatkan Nilai Investasi dan Pendapatan Daerah				
	2.1.3.1	Persentase Kenaikan PAD	%	4,00
	2.1.3.2	Nilai Investasi	Rp (Trilliun)	75
Indikator Kinerja			Satuan	Target
2.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	73
2.2.1 Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan				
	2.2.1.1	Indeks Kesehatan	Indeks	0,46
	2.2.1.2	Stunting (SSGI)	%	13
2.2.2 Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan				
	2.2.2.1	Indeks Pendidikan	Indeks	59,00

TUJUAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah				
Indikator Kinerja			Satuan	Target
3.1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)		Predikat	B
3.1.1 Meningkatkan kualitas Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	3.1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	%	85,00

	3.1.1.2	Nilai SAKIP	Predikat	B
	3.1.1.3	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	77,4 (Waspada)
	3.1.1.4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	42,50
	3.1.1.5	Nilai SPBE	Nilai	2,00
	3.1.1.6	Indeks Pengelolaan Keuangan (IPKD)	Nilai	77,0
<b>3.1.2 Meningkatnya Kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN</b>				
	3.1.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	%	76

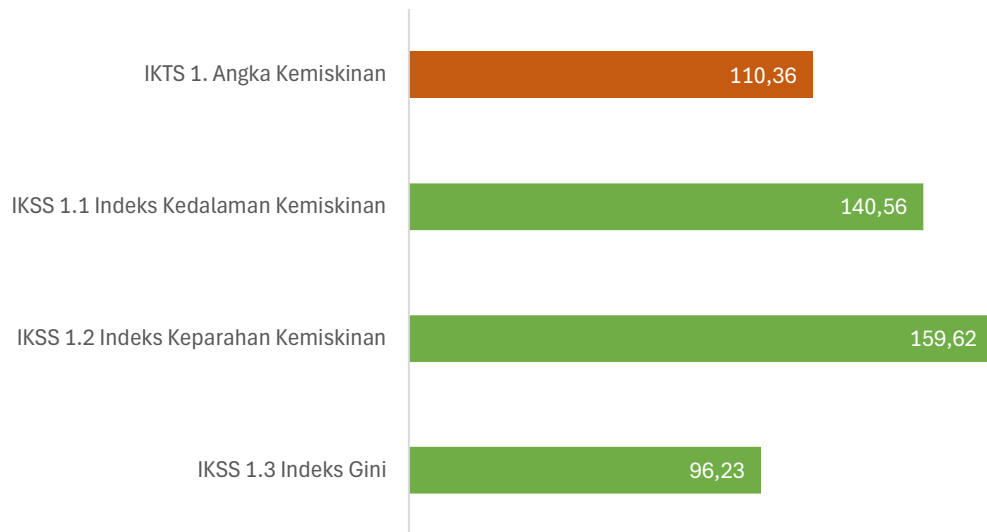
<b>TUJUAN STRATEGIS IV</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata</b>				
	<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
4.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		Indeks	70,00
<b>4.1.1 Meningkatnya Persentase Infrastruktur dalam kondisi Baik</b>				
	4.1.1.1	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	%	26,50
<b>4.1.2 Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang</b>				
	4.1.2.1	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	%	55,00
<b>4.1.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan</b>				
	4.1.3.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	81,50

TUJUAN STRATEGIS V				
Menciptakan tatanan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari risiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah				
	Indikator Kinerja		Satuan	Target
5.1	Indeks Rasa Aman		Indeks	80,00
<b>5.1.1 Terjaganya Kehidupan Masyarakat yang aman dan tentram damai dan Harmonis</b>				
	5.1.1.1	Angka kriminalitas	%	17,50
	5.1.1.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,00
5.2	Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten		Indeks	Level 3
<b>5.2.1 Meningkatnya Kapasitas penanggulangan Bencana Daerah dan Kemajuan Pembangunan Desa</b>				
	5.2.1.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Indeks	172,00
	5.2.1.2	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,6908

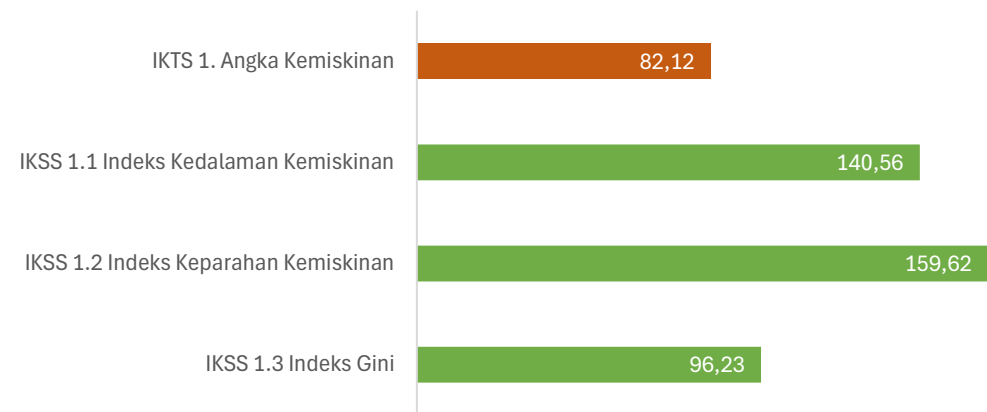
## B. Pengukuran capaian kinerja di bandingkan dengan target perjanjian kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 digambarkan dalam lima (5) tujuan strategis dengan tujuh (7) indikator kinerja utama tujuan serta tiga belas (13) sasaran strategis dengan dua puluh lima (25) indikator kinerja utama sasaran. Adapun progres capaian kinerja Kabupaten Morowali Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

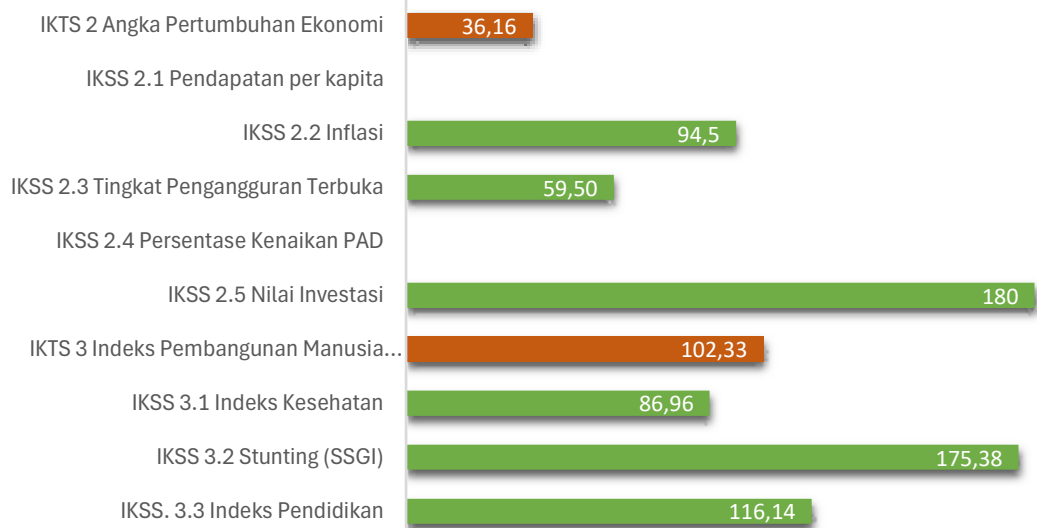
**Tujuan I "Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial yang merata "**



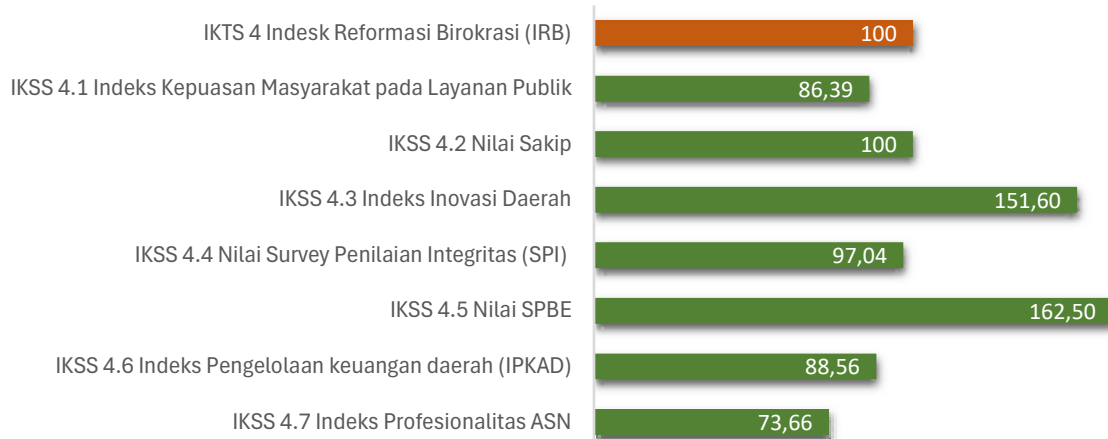
**Tujuan I "Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial yang merata "**



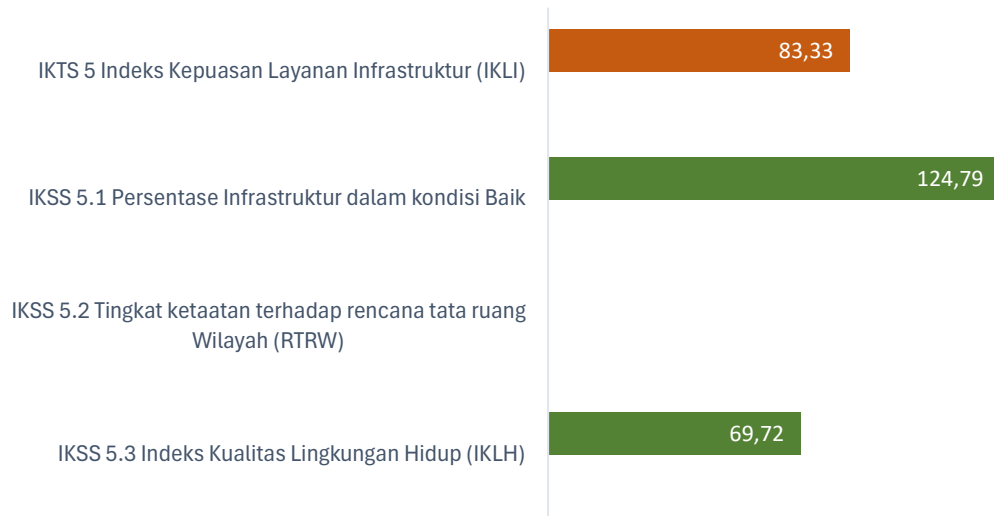
## Tujuan II "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah"



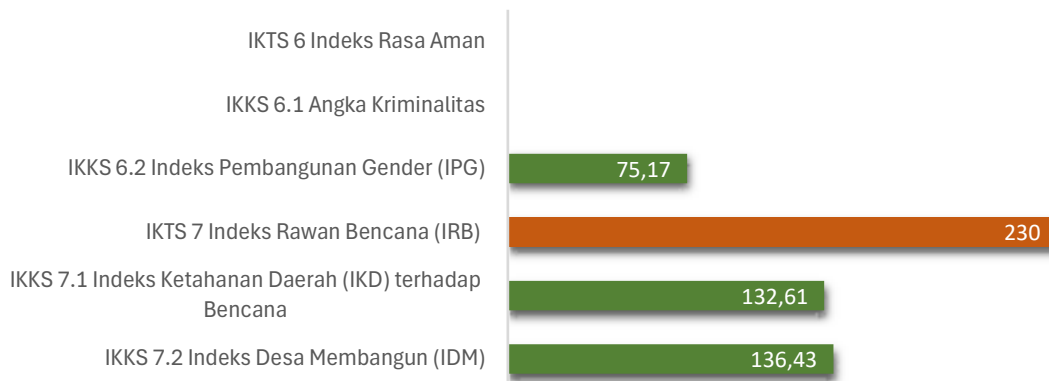
## Tujuan III "Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah"



**Tujuan IV "Meningkatnya Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata"**



**Tujuan V " Menciptakan tatanan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah"**



Tabel. 2.3.1

Capaian Kinerja dibandingkan Target Perjanjian Kinerja  
Berdasarkan Tujuan Strategis

Tujuan Strategis I						
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial yang merata						
NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
IKTS 1	Angka Kemiskinan	%	11,58	10,38	110,36	BPS
Sasaran Strategis 1 : Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin						
IKSS 1.1.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1,80	1,07	140,56	BPS (data per 6 Oktober 2025)
IKSS 1.1.2	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,52	0,21	159,62	BPS (data per 1 desember 2025)
IKSS 1.1.3	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,265	0,275	96,23	BPS ( data per tgl 4 Maret 2025)

Tujuan Strategis II						
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah						
NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
IKTS 2.1	Angka Pertumbuhan Ekonomi	%	25	9,04	36,16	Bappelibangda (data per tw 3)
Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat						
IKSS 2.1.1	Pendapatan per kapita	Indeks	420		0	Belum rilis
IKSS 2.1.2	Inflasi	%	2,00	1,89	94,5	BPS
Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja						
IKSS 2.2.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Indeks	2,00	2,81	59,5	BPS (data per tgl 6 November 2025)
Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan investasi dan pendapatan daerah						
IKSS 2.3.1	Persentase Kenaikan PAD	%	4,00	0		
IKSS 2.3.2	Nilai Investasi	Rp(triliun)	75,00	135	180	LKJIP Dinas Penanaman PTSP
IKTS 3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,00	74,70	102,33	BPS (data per tgl 6 November 2025)
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan						
IKSS 3.1.1	Indeks Kesehatan	%	0,46	0,4	86,96	LKJIP Dinas Kesehatan
IKSS 3.1.2	Stunting (SSGI)	indeks	13	3,2	175,38	
Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan						

IKSS. 3.2.1	Indeks Pendidikan	indeks	59	68,52	116,14	Bappelibangda (Data Evaluasi RKPD 2025)
----------------	-------------------	--------	----	-------	--------	---

Tujuan Strategis III						
Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						
NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
IKTS 4	Indesk Reformasi Birokrasi (IRB)	Predika t	B	B	100	(LKE Kemenpan RB per tgl 11 Februari)
Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik						
IKSS 4.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Publik	Indeks	85,00	73,43	86,39	Penilaian OMBUDSMAN (thn 2024)
IKSS 4.1.2	Nilai Sakip	Predika t	B	B (60,73)	100	LHE tahun 2025
IKSS 4.1.3	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	42,50	64,43	151,60	Data BAPPELIBANGDA
IKSS 4.1.4	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	77,4 (waspada )	75,11	97,04	Inspektorat
IKSS 4.1.5	Nilai SPBE	Predika t	2,00	3,25	162,50	Dinas Kominfo (nilai tahun 2024)
IKSS 4.1.6	Indeks Pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	Indeks	77,00	68,19	88,56	BPKAD (Hasil Pengukuran IPKD 2024)
Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Kualitas ASN berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, kompetensi dan Kinerja ASN						
IKSS 4.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76,00	55,98	73,66	LKJIP BKPSDM

Tujuan Strategis IV						
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)						
NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
IKTS 5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	60	50	83,33	LKjIP Dinas PUPR
Sasaran Strategis 9: Meningkatkan persentase wilayah dengan infasturktur baik						
IKSS 5.1.1	Persentase Infrastruktur dalam kondisi Baik	%	26,50	33,07	124,79	Dinas PUPR
Sasaran Strategis 10 : Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang						

IKSS 5.2.1	Tingkat ketaatan terhadap rencana tata ruang Wilayah (RTRW)	%	55,00	n/a		Belum rilis
Sasaran Strategis 11 : Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan						
IKSS 5.3.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	81,50	85,54	104,96	LKjIP Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan Strategis V						
Menciptakan tatanan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah						
NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
IKTS 6	Indeks Rasa Aman	Indeks	80,00	n/a		Belum rilis
Sasaran Strategis 12 : Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram damai dan harmonis						
IKSS 6.1.1	Angka Kriminalitas	%	17,50	n/a		Belum rilis
IKSS 6.1.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,00	85,42	75,17	BPS ( IPG 2024 PER 21 APRIL 2025)
IKTS 7	Indeks Rawan Bencana (IRB)	Indeks	Level 3	230		BPBD
Sasaran Strategis 13: Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah dan kemajuan pembangunan desa						
IKSS 6.2.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Indeks	173,50	230,08	132,61	BPBD
IKSS 6.2.2	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,6908	0,94244	136,43	Lampiran ID Morowali

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Morowali menetapkan tujuh Indikator Kinerja Tujuan Strategis (IKTS) sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan mayoritas indikator berada pada kategori Baik dan Baik Sekali. Berikut tabel Rekapitulasi indikator kinerja Tujuan Strategis (IKTS) dan indikator kinerja Sasaran Strategis (IKSS):

Tabel Rekapitulasi Indikator Tujuan Strategis

No	Kode IKTS	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	IKTS 1	Angka Kemiskinan	11,58%	10,38%	110,36	Baik Sekali (BS)
2	IKTS 2	Angka Pertumbuhan Ekonomi	25%	9,04%	36,16	Kurang (K)
3	IKTS 3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73	74,7	102,33	Baik Sekali (BS)
4	IKTS 4	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	B	B	100	Baik (B)
5	IKTS 5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	60	50	83,33	Baik (B)
6	IKTS 6	Indeks Rasa Aman	80	n/a	-	Belum dinilai
7	IKTS 7	Indeks Rawan Bencana (IRB)	Level 3	230		

No	Kode Indikator	Indikator Sasaran Strategis	Capaian (%)	Kategori
1	IKSS 1.1.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	140,56	Baik Sekali (BS)
2	IKSS 1.1.2	Indeks Keparahan Kemiskinan	159,62	Baik Sekali (BS)
3	IKSS 1.1.3	Indeks Gini Rasio	96,23	Baik (B)
4	IKSS 2.1.1	Pendapatan Per Kapita	-	Belum dinilai
5	IKSS 2.1.2	Inflasi	94,5	Baik (B)
6	IKSS 2.2.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	59,5	Cukup (C)
7	IKSS 2.3.1	Persentase Kenaikan PAD	-	Belum dinilai
8	IKSS 2.3.2	Nilai Investasi	180	Baik Sekali (BS)
9	IKSS 3.1.1	Indeks Kesehatan	86,96	Baik (B)
10	IKSS 3.1.2	Stunting (SSGI)	175,38	Baik Sekali (BS)
11	IKSS 3.2.1	Indeks Pendidikan	116,14	Baik Sekali (BS)

12	IKSS 4.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,39	Baik (B)
13	IKSS 4.1.2	Nilai SAKIP	100	Baik (B)
14	IKSS 4.1.3	Indeks Inovasi Daerah	151,6	Baik Sekali (BS)
15	IKSS 4.1.4	Nilai SPI	97,04	Baik (B)
16	IKSS 4.1.5	Nilai SPBE	162,5	Baik Sekali (BS)
17	IKSS 4.1.6	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	88,56	Baik (B)
18	IKSS 4.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	73,66	Cukup (C)
19	IKSS 5.1.1	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	124,79	Baik Sekali (BS)
20	IKSS 5.2.1	Tingkat Ketaatan RTRW	-	Belum dinilai
21	IKSS 5.3.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	104,96	Baik Sekali (BS)
22	IKSS 6.1.1	Angka Kriminalitas	-	Belum dinilai
23	IKSS 6.1.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	75,17	Baik (B)
24	IKSS 6.2.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	132,61	Baik Sekali (BS)
25	IKSS 6.2.2	Indeks Desa Membangun (IDM)	136,43	Baik Sekali (BS)

## **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

### **TUJUAN I : Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial yang merata**

Upaya menjaga keberlanjutan pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Morowali pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui kebijakan yang terfokus pada penurunan Angka Kemiskinan serta pengurangan tingkat kesenjangan antarpenduduk. Hal ini tercermin dari capaian indikator pada Tujuan Strategis I dan Sasaran Strategis 1.

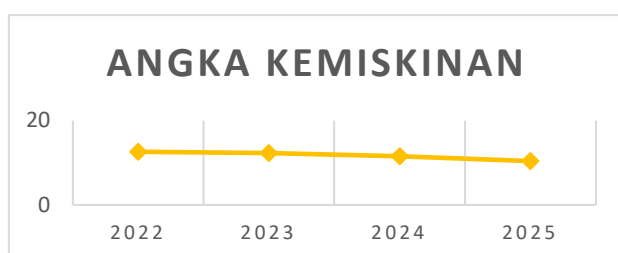
## IKTS I Angka Kemiskinan

Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Morowali pada Tahun

Target	Realisasi	Capaian (%)
11,58	10,38	110,36

Anggaran 2025 mencapai 110,36 persen dan termasuk dalam kategori Baik Sekali (BS) karena berada pada lebih dari 100 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja penurunan angka kemiskinan melampaui target yang telah ditetapkan, kinerja Angka Kemiskinan termasuk dalam kategori Baik Sekali (BS) karena berada pada nilai di atas 100 persen.



Apabila dilihat berdasarkan tren perkembangan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, angka kemiskinan menunjukkan pola tren

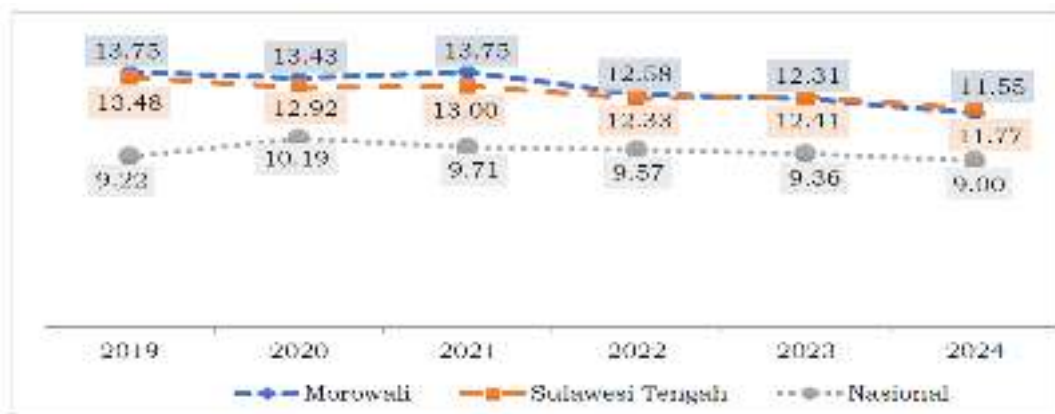
penurunan dalam empat (4) tahun. Pada Tahun 2022, angka kemiskinan tercatat sebesar 12,58 persen, kemudian menurun pada Tahun 2023 menjadi 12,31 persen. Penurunan kembali terjadi pada Tahun 2024 dengan capaian sebesar 11,55 persen, yang mencerminkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat serta efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan data BPS angka kemiskinan turun menjadi 10,38%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, terjadi penurunan secara absolut sebesar 1,17 poin, dan dibandingkan dengan Tahun 2022 meningkat sebesar 1,07 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika sosial ekonomi yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun berjalan.

Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya dengan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomian maupun pemerataan pembangunan, serta meningkatkan ketajaman dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten

Morowali antara lain yakni meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Morowali bila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional masih lebih tinggi di atas rata-rata, menunjukkan adanya tantangan struktural, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, atau ketimpangan hasil pembangunan antarwilayah. Sebaliknya, tingkat kemiskinan yang lebih rendah mencerminkan capaian pembangunan yang lebih baik di wilayah tersebut



(sumber : Buku RKPD I 2026, hal 21, data diolah)

### IKSS 1.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan

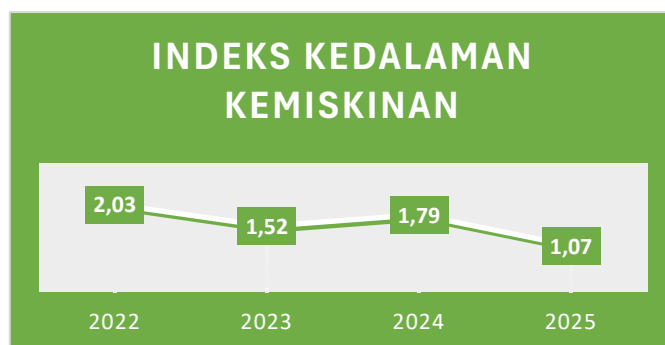
Indeks Kedalaman Kemiskinan mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai indeks ini, maka semakin kecil jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang berarti tingkat kesejahteraan relatif semakin membaik.

Target	Realisasi	Capaian (%)
1,80	1,07	140,56

Pada Tahun Anggaran 2025, target Indeks Kedalaman Kemiskinan ditetapkan sebesar 1,80, dengan realisasi sebesar 1,07, sehingga capaian kinerja mencapai 140,56 persen. Berdasarkan persentase tersebut, kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Baik Sekali (BS) karena melebihi 100 persen.

Capaian ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan lebih rendah dari yang ditargetkan. Dengan kata lain, beban ekonomi yang dialami oleh penduduk miskin relatif lebih ringan dibandingkan proyeksi awal. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat telah memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan.

Penurunan indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan adanya perbaikan pada aspek kualitas kesejahteraan kelompok miskin, terutama dalam mendekatkan tingkat pengeluaran mereka ke garis kemiskinan.



Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Morowali selama periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan tren yang berfluktuasi namun

cenderung membaik pada tahun terakhir. Pada Tahun 2022, indeks tercatat sebesar 2,03, kemudian mengalami penurunan cukup signifikan pada Tahun 2023 menjadi 1,52, yang menunjukkan berkurangnya rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Namun demikian, pada Tahun 2024 terjadi peningkatan kembali menjadi 1,79, yang mengindikasikan adanya peningkatan jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan pada periode tersebut. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika sosial dan ekonomi pada tahun berjalan.

Selanjutnya, pada Tahun 2025 indeks kembali mengalami penurunan signifikan menjadi 1,07, yang merupakan capaian terendah dalam periode tersebut. Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin semakin mengecil,

sehingga kondisi kesejahteraan kelompok miskin relatif membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan target yang telah ditetapkan sebesar 1,80, realisasi sebesar 1,07 menghasilkan capaian kinerja sebesar 140,56 persen, yang termasuk dalam kategori Baik Sekali (BS) karena melebihi 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Morowali dalam menekan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan telah berjalan sangat efektif dan melampaui target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada periode sebelumnya, capaian tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang signifikan dan menjadi indikator positif dalam pengurangan tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Morowali.

#### IKSS 1.2 Indeks Keparahan Kemiskinan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks ini, semakin rendah tingkat ketimpangan di dalam kelompok penduduk miskin, sehingga menunjukkan kondisi kesejahteraan yang semakin merata.

Target	Realisasi	Capaian (%)
0,52	0,21	159,62

Berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 0,52, realisasi Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Morowali tercatat sebesar 0,21, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 159,62 persen. Persentase capaian tersebut termasuk dalam kategori Baik Sekali (BS) karena melebihi 100 persen.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, serta intervensi kebijakan yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif terhadap pengurangan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi Indeks Keparahan Kemiskinan antara lain Pengeluaran per kapita dan Garis

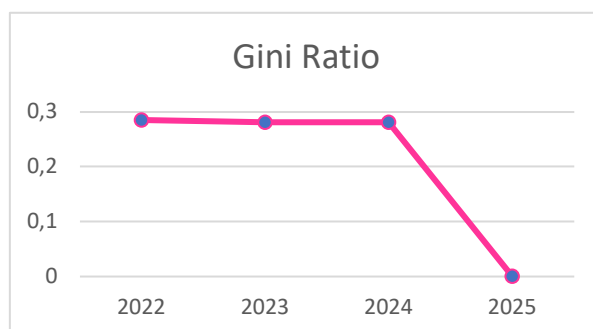
kemiskinan. pemerintah daerah tetap melakukan berbagai upaya untuk dapat menurunkan indeks keparahan kemiskinan.

### IKSS 1.3 Indeks Gini Rasio

Indeks Gini Ratio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Nilai Gini Ratio berada pada rentang 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 0 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin rendah (semakin merata).

Pada Tahun 2025, target Indeks Gini Ratio ditetapkan sebesar 0,265 sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 0,275, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 96,23%. Semakin rendah atau semakin mendekati 0 maka ketimpangan di tahun 2025 bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masih berada di atas kondisi yang diharapkan. Dengan capaian sebesar 96,23%, indikator ini dapat dikategorikan baik.

Secara umum, kinerja pengendalian ketimpangan pendapatan berada dalam kategori baik, namun masih memerlukan penguatan kebijakan pemerataan ekonomi agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal pada tahun berikutnya.



Secara tren, Gini Ratio menunjukkan penurunan bertahap sejak tahun 2022 hingga 2025, yang berarti tingkat ketimpangan pendapatan semakin membaik

dari tahun ke tahun.

Dibandingkan Tahun 2024 ( $\pm 0,28$ ), Tahun 2025 mengalami sedikit penurunan menjadi 0,275. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan distribusi pendapatan meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja.

Secara umum, tren empat tahun terakhir menunjukkan arah yang positif dan stabil dalam pengendalian ketimpangan ekonomi.

Untuk meningkatkan capaian pada tahun berikutnya, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan, terutama melalui pengembangan UMKM, akses permodalan, dan pelatihan kewirausahaan.
2. Peningkatan kualitas dan akses lapangan kerja, khususnya bagi kelompok usia produktif melalui pelatihan berbasis kompetensi dan link and match dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Optimalisasi program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, berbasis data terpadu kesejahteraan sosial yang akurat dan mutakhir.
4. Pemerataan pembangunan wilayah, terutama pada daerah dengan tingkat ketimpangan relatif tinggi.
5. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap dampak program pemerataan, agar intervensi kebijakan dapat disesuaikan secara adaptif.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Gini Ratio Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan stabil, dengan tren ketimpangan yang terus menurun sejak Tahun 2022. Meskipun target belum sepenuhnya tercapai, arah kebijakan sudah berada pada jalur yang tepat dan memerlukan penguatan agar distribusi pendapatan masyarakat semakin merata pada tahun-tahun mendatang.

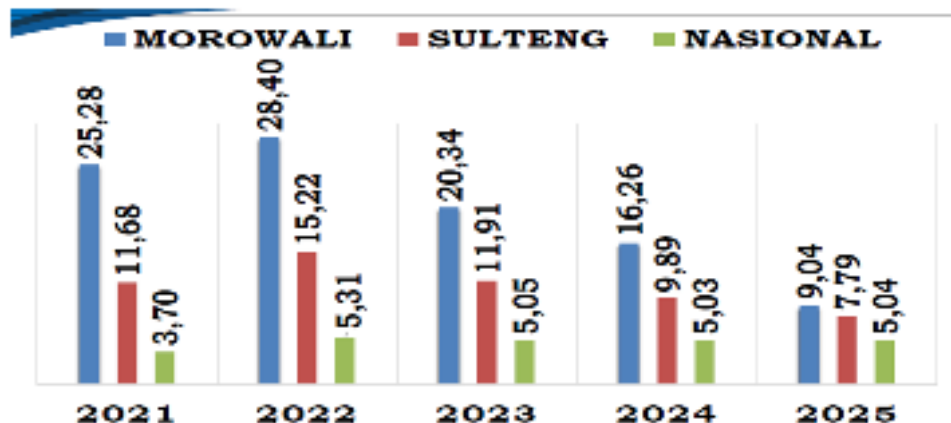
## **TUJUAN II : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah**

### **IKTS 2 Angka Pertumbuhan Ekonomi**

Indikator Angka Pertumbuhan Ekonomi digunakan untuk mengukur peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kapasitas produksi daerah.

Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Tahun 2025 ditetapkan sebesar 25,00 persen. Berdasarkan data sementara sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, realisasi pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 9,04 persen, sehingga capaian kinerja sementara mencapai 36,16 persen dari target tahunan.

Capaian tersebut menunjukkan adanya perlambatan apabila dibandingkan dengan tren pertumbuhan sejak Tahun 2022 atau dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali masih berada pada urutan kedua tertinggi se-Sulawesi Tengah setelah Kabupaten Morowali Utara, serta berada di atas rata-rata pertumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah maupun nasional.



(sumber data : Bappelitbangda)

Secara sektoral, perlambatan pertumbuhan dipengaruhi oleh menurunnya kinerja sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan, yang selama ini menjadi kontributor utama terhadap PDRB daerah. Tren penurunan pada kedua sektor tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sektor industri berbasis ekstraktif tidak dapat menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Perlambatan pada sektor dominan tersebut menjadi sinyal penting bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah strategis dalam mendorong diversifikasi ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ke depan diarahkan pada:

1. Optimalisasi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai sektor basis ekonomi masyarakat;
2. Penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM;
3. Peningkatan nilai tambah komoditas lokal melalui hilirisasi berbasis potensi daerah;

Dengan strategi tersebut, diharapkan struktur ekonomi Kabupaten Morowali menjadi lebih seimbang, tidak hanya bertumpu pada sektor industri dan pertambangan, tetapi juga didukung oleh sektor-sektor produktif masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan lebih berkualitas dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **IKSS 2.1. Pendapatan Perkapita**

Indikator Pendapatan Per Kapita merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemampuan ekonomi daerah. Sampai dengan penyusunan laporan ini, data resmi Pendapatan Per Kapita Tahun 2025 masih dalam proses pengolahan dan validasi oleh instansi yang berwenang, sehingga nilai realisasi belum dapat disajikan.

Meskipun data Tahun 2025 belum tersedia, berdasarkan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah serta perkembangan indikator makro lainnya, kondisi perekonomian daerah menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil. Pemerintah Daerah terus berupaya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui:

- 🏗️ Penguatan sektor unggulan;
- 🏗️ Peningkatan investasi;
- 🏗️ Pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal;
- 🏗️ Program perlindungan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

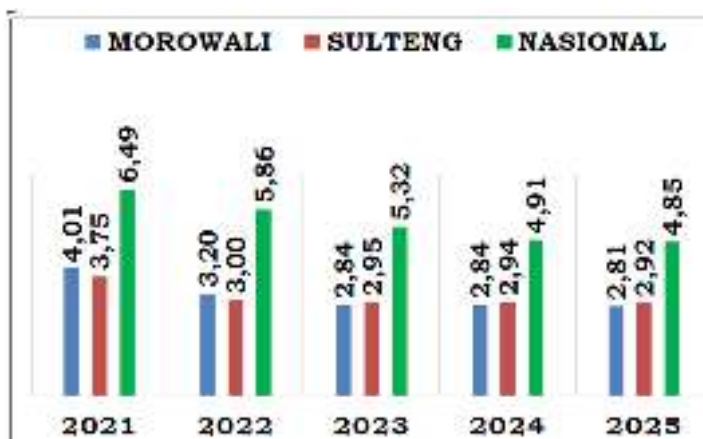
#### **IKSS 2.1.2 Inflasi**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pada Desember 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Morowali sebesar 1,89 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,78.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sejumlah kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,41 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,04 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,49 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,32 persen; kelompok transportasi sebesar 1,8 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,09 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,03 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,46 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,16 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,12 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen.

### IKSS 2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,00%, sedangkan realisasinya sebesar 2,81%. Berdasarkan perhitungan dengan metode indikator semakin rendah semakin baik, diperoleh capaian kinerja sebesar 59,5 %, yang menunjukkan bahwa target belum tercapai secara optimal.



Realisasi TPT yang lebih tinggi dari target mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru.

Meskipun demikian, angka 2,81% masih berada pada kategori pengangguran relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional, sehingga secara makro kondisi ketenagakerjaan daerah masih tergolong cukup stabil. Beberapa faktor umum yang mempengaruhi capaian indikator ini antara lain:

- 🧩 Terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru pada sektor formal;
- 🧩 Ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha;
- 🧩 Fluktuasi pertumbuhan sektor unggulan daerah;
- 🧩 Mobilitas tenaga kerja antarwilayah.

Selain itu, Dalam rangka mendukung penurunan Tingkat



Pengangguran Terbuka (TPT), Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja melaksanakan kegiatan Job Fair (Bursa Kerja) yang bertujuan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan pengguna tenaga kerja secara langsung.

Meskipun capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka belum mencapai target yang ditetapkan, pelaksanaan Job Fair menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam: (1) Mendorong penciptaan kesempatan kerja; (2) Memfasilitasi pertemuan langsung antara pemberi kerja dan pencari kerja; dan (3) Mengoptimalkan peran sektor swasta dalam penyerapan tenaga kerja.

#### **IKSS. 2.1.4 Persentase Kenaikan PAD**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah. Pada Tahun 2025, target PAD ditetapkan sebesar Rp 589.684.302.035,00, dengan realisasi sebesar Rp 805.898.676.201,00, sehingga capaian kinerja mencapai 136,67%.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 624.812.364.490,12, maka realisasi PAD Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 181.086.311.710,88 atau 28,98%. Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan penerimaan daerah yang signifikan dan mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Peningkatan PAD Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Peningkatan kepatuhan wajib pajak;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
4. Meningkatnya aktivitas ekonomi daerah;
5. Perbaikan sistem pengelolaan dan pengawasan pendapatan.

Secara kinerja, capaian sebesar 136,67% dapat dikategorikan Sangat Berhasil, karena realisasi melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan pengelolaan pendapatan daerah serta adanya peningkatan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap penerimaan daerah.

Namun demikian, peningkatan PAD juga perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola keuangan daerah, peningkatan transparansi, serta pengalokasian belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja PAD Tahun 2025 menunjukkan tren positif dan memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan.

#### **IKSS 2.1.5 Nilai Investasi**

Berdasarkan data yang bersumber dari LKjIP Dinas Penanaman Modal Tahun 2025, indikator Nilai Investasi ditetapkan dengan target sebesar 75, dengan realisasi sebesar 135, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 180%.

Target	Realisasi	Capaian (%)
2,00	-0,24	-12%

Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi investasi daerah pada Tahun 2025 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penanaman modal, khususnya dalam upaya peningkatan promosi potensi daerah, fasilitasi investasi, penyederhanaan perizinan, serta optimalisasi pelayanan kepada investor.

Realisasi investasi yang melebihi target juga mengindikasikan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi daerah. Kondisi ini berdampak positif terhadap penguatan aktivitas ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah.

Berdasarkan data realisasi Nilai Investasi Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, terlihat adanya dinamika perkembangan investasi yang bersifat fluktuatif.



Pada Tahun 2022 realisasi investasi tercatat sebesar 240. Selanjutnya pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 158, yang mengindikasikan adanya perlambatan investasi. Penurunan

tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, ketidakpastian global, maupun faktor internal daerah seperti kesiapan proyek dan iklim usaha.

Memasuki Tahun 2024, realisasi investasi meningkat signifikan menjadi 435, yang menunjukkan adanya lonjakan minat investasi. Namun demikian, pada Tahun 2025 realisasi investasi tercatat sebesar 135, mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 maupun Tahun 2022. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berakhirnya proyek investasi skala besar pada tahun sebelumnya, adanya penyesuaian siklus investasi, atau dinamika ekonomi regional dan nasional.

Secara keseluruhan, capaian indikator Nilai Investasi Tahun 2025 dapat dikategorikan Sangat Berhasil, dan menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal telah dilaksanakan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, diperlukan penguatan strategi promosi investasi, serta peningkatan kemudahan berusaha guna menjaga tren investasi tetap stabil dan berkelanjutan.

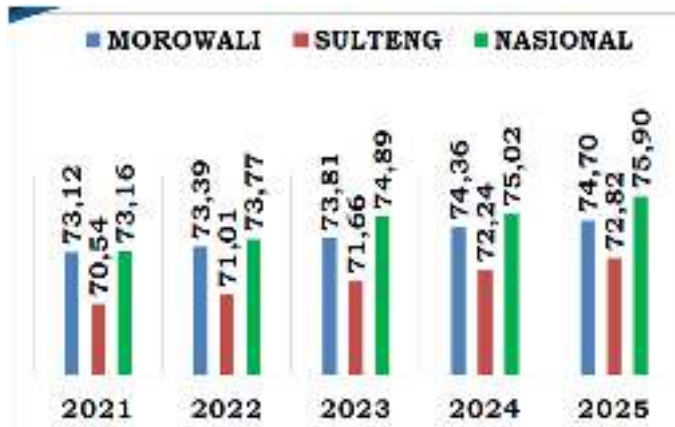
### **IKTS 3 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Morowali Tahun 2025 ditargetkan sebesar 73,00 dengan realisasi mencapai 74,70 atau sebesar 102,32%, sehingga target kinerja dapat terlampaui. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Capaian IPM tersebut memiliki keterkaitan erat dengan indikator makro pembangunan lainnya, khususnya tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan IPM mencerminkan membaiknya akses dan kualitas layanan dasar, yang secara langsung berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang positif turut memperkuat peningkatan IPM melalui peningkatan kesempatan kerja,

peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatnya daya beli. Sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang stabil dan intervensi pada sektor pendidikan serta kesehatan menjadi faktor penting dalam mendorong kualitas pembangunan manusia yang berkelanjutan.



Secara regional, IPM Kabupaten Morowali menempati peringkat kedua tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah setelah Kota Palu, serta berada di atas rata-rata provinsi. Namun demikian, capaian

tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional, sehingga diperlukan penguatan kebijakan yang lebih terarah dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

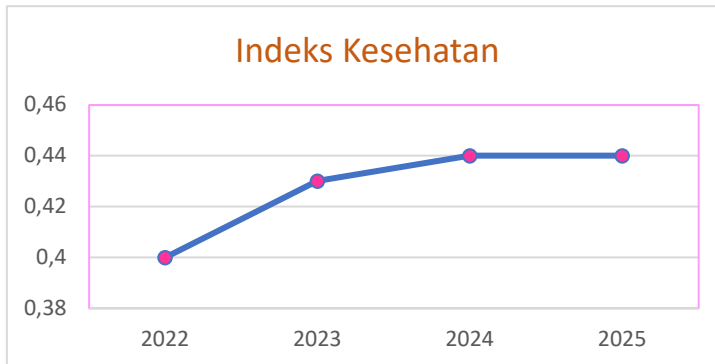
Dengan demikian, capaian IPM Tahun 2025 tidak hanya menunjukkan keberhasilan pada indikator tunggal, tetapi juga merefleksikan efektivitas kebijakan pembangunan daerah secara komprehensif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### IKSS 3.1 Indeks Kesehatan

Berdasarkan data dari LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, capaian Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 2025 meningkat dari target rencana kinerja sebesar 71,09 tahun menjadi realisasi sebesar 71,34 tahun. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat, meskipun capaian tersebut masih perlu terus ditingkatkan.

Umur Harapan Hidup merupakan indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat dan menjadi komponen penting dalam pembentukan Indeks Kesehatan Masyarakat, yang

selanjutnya berkontribusi terhadap perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian, peningkatan UHH mencerminkan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat secara umum.



Berdasarkan data capaian Indeks Kesehatan Masyarakat Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, terlihat adanya tren peningkatan yang

relatif stabil. Pada Tahun 2022 indeks kesehatan tercatat sebesar 0,40, kemudian meningkat menjadi 0,43 pada Tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya pada Tahun 2024 indeks kesehatan kembali meningkat menjadi 0,44, dan pada Tahun 2025 tetap berada pada angka 0,44. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan layanan kesehatan telah mampu mempertahankan capaian pada level yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun belum menunjukkan kenaikan yang signifikan pada tahun terakhir.

Indeks Kesehatan Kabupaten Morowali 0,44 masih berada dalam kategori tidak sehat, yang menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat sistemik maupun perilaku masyarakat.

Salah satu faktor utama adalah belum optimalnya pembaruan data pada aplikasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Kendala jaringan di beberapa wilayah menyebabkan proses pendataan tidak ter-update secara berkala, sehingga mempengaruhi akurasi dan validitas data kesehatan masyarakat. Keterbatasan data yang mutakhir berdampak pada kurang optimalnya perencanaan dan intervensi program kesehatan yang berbasis

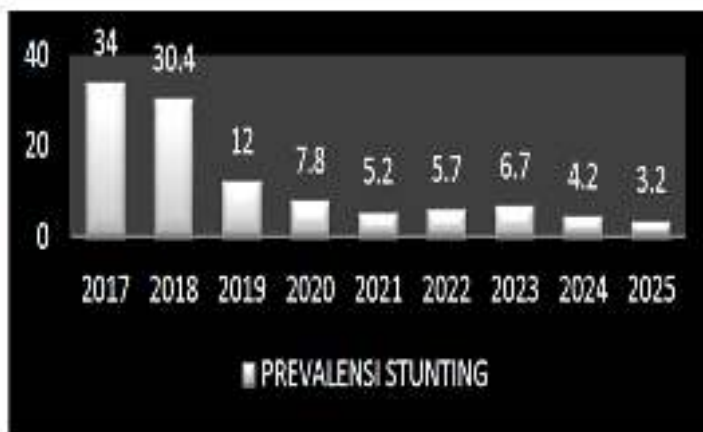
kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, pelayanan kesehatan belum sepenuhnya berjalan optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang belum memenuhi standar pelayanan kesehatan. Kondisi ini terutama dirasakan di wilayah terpencil dan kepulauan, yang berdampak pada belum meratanya akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Faktor lain yang turut mempengaruhi rendahnya Indeks Kesehatan adalah perilaku dan pola hidup masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pola hidup sehat. Beberapa kebiasaan yang masih cukup tinggi antara lain: Kebiasaan merokok, Rendahnya konsumsi sayur dan buah serta Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Pola hidup yang kurang sehat tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyakit tidak menular serta menurunkan kualitas kesehatan masyarakat secara umum.

Dengan demikian, peningkatan Indeks Kesehatan tidak hanya memerlukan penguatan sistem dan pelayanan kesehatan, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi dan promosi kesehatan yang berkelanjutan. Penguatan program promotif dan preventif, peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas kesehatan, serta optimalisasi sistem pendataan berbasis digital menjadi langkah strategis dalam mendorong perbaikan Indeks Kesehatan di Kabupaten Morowali.

### **IKSS 3.2 Stunting**



Berdasarkan LKjIP Dinas Kesehatan bahwa Prevalensi stunting di Kabupaten Morowali menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dimana Berdasarkan data PSG

(Pemantauan Status Gizi) Kementerian Kesehatan Tahun 2017, jumlah balita stunting mencapai 3.608 balita (34%). Selanjutnya berdasarkan data Riskesdas Tahun 2018, prevalensi balita stunting tercatat sebesar 30,40%, yang menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbaikan yang lebih signifikan terlihat pada Tahun 2019 berdasarkan data *e-PPGBM*, dimana jumlah balita stunting tercatat sebanyak 1.042 balita (12%). Pada Tahun 2020 (data per Agustus), angka tersebut kembali menurun menjadi 849 balita (7,8%). Tren positif ini terus berlanjut hingga Tahun 2023, dimana pada bulan Desember prevalensi stunting turun menjadi 6,7% (648 balita), dan kembali menurun pada Tahun 2024 menjadi 4,2% (571 balita).

Penurunan prevalensi stunting tersebut menunjukkan keberhasilan intervensi yang dilakukan secara konsisten dan terintegrasi. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen pemerintah pusat dan daerah, baik dari sisi penyediaan sarana pelayanan kesehatan, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang terstandar, maupun dukungan logistik untuk pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.

Pelaksanaan intervensi dilakukan secara konvergensi, melalui sinergi lintas program dan lintas sektor, mencakup intervensi spesifik (bidang kesehatan) maupun intervensi sensitif (air bersih, sanitasi, ketahanan pangan, pendidikan, dan perlindungan sosial). Pendekatan

terintegrasi ini menjadi faktor kunci dalam mempercepat penurunan angka stunting.

### **IKSS 3.3 Indeks Pendidikan**

Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan capaian pembangunan pada dimensi pengetahuan. Indeks pendidikan dihitung berdasarkan dari komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
	2025	2025
1	2	3
Sulawesi Tengah	13,35	9,1
Banggai Kepulauan	13,12	8,88
Banggai	13,43	8,94
Morowali	13,40	9,93
Poso	13,76	9,84
Donggala	12,75	8,01
Tolitoli	13,18	9
Buol	13,19	9,21
Parigi Mautong	12,53	8,07
Tojo Una-una	12,62	8,58
Sigi	13,3	9,05
Banggai Laut	13,17	8,66
Morowali Utara	12,6	9,14
Kota Palu	16,53	11,76

(Sumber data BPS 6 november 2025)

Pada Tahun 2025, target Indeks Pendidikan ditetapkan sebesar 52, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 68,52, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 116,14%. Berdasarkan perhitungan tersebut, capaian indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik, karena realisasi melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya,



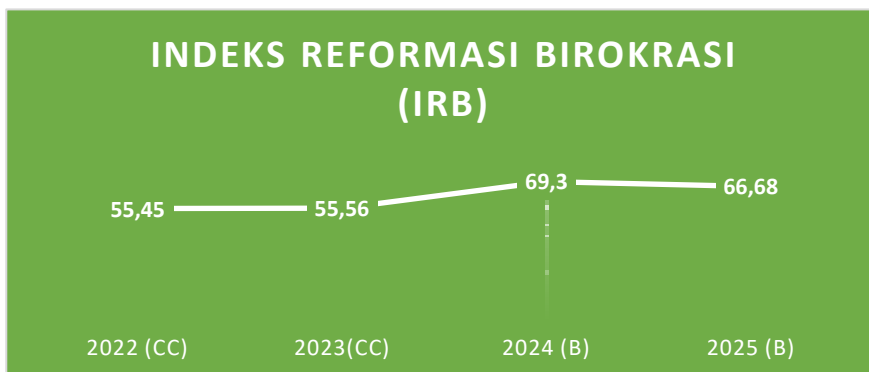
nilai Indeks Pendidikan menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada sektor pendidikan, terutama dalam peningkatan akses

dan partisipasi pendidikan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta dukungan kebijakan daerah dalam mendorong keberlanjutan pendidikan.

#### IKTS 4 INDEKS REFORMASI BIROKRASI (RB)

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang masih mengacu pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai Keputusan Menteri PANRB, diperoleh total nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 66,68, yang masih berada dalam kategori Baik (Predikat B). Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Morowali telah berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan dan mampu mempertahankan predikat B sebagaimana tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi tren



peningkatan yang cukup signifikan sejak Tahun 2022 dan 2023 yang masih berada

pada kategori CC dengan nilai sekitar 55. Pada Tahun 2024 nilai meningkat menjadi sekitar 69 dengan Predikat B, dan pada Tahun

2025 meskipun sedikit mengalami penurunan menjadi 66,68, namun tetap mampu mempertahankan kategori Baik (B). Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, walaupun masih diperlukan penguatan pada beberapa komponen penilaian, khususnya strategi pelaksanaan, RB Tematik, serta optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi.

Secara umum, tren capaian tersebut mencerminkan bahwa Reformasi Birokrasi di Kabupaten Morowali mengalami perbaikan dibanding periode 2022–2023, serta telah berada pada level yang lebih baik, namun tetap memerlukan peningkatan kualitas implementasi dan penguatan dampak terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik agar dapat meningkat ke predikat yang lebih tinggi pada periode mendatang.

#### **IKTS 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Publik**

Secara kuantitatif, capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 86,39%, yang termasuk dalam kategori Baik, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan (85,00). Penggunaan nilai realisasi Tahun 2024 sebagai dasar pengukuran Tahun 2025 dilakukan karena pada Tahun 2025 tidak terdapat penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, nilai 73,43 menjadi proksi kinerja terakhir yang tersedia.

Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam sistem layanan, penerapan standar operasional prosedur yang lebih tertib, serta meningkatnya responsivitas aparatur terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun demikian, belum tercapainya target 85,00 menunjukkan bahwa standar pelayanan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat. Berikut penilaian indikator tersebut pada 7 unit layanan.

Target	Realisasi	Capaian (%)
85	73,43	86,39

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21.85)	Proses (32.37)	Output (24.24)	Pengaduan (21.54)	
1	Puskesmas Bungku	19.82	26.47	23.19	19.95	89.43
2	Dinas Sosial	14.03	20.85	23.27	7.68	65.83
3	Puskesmas Fonuasingko	20.71	29.79	23.04	20.48	94.02
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.42	27.50	22.92	17.85	85.70
5	Dinas Pendidikan	13.42	6.09	23.27	5.93	48.71
6	Dinas Kesehatan	9.14	8.14	23.27	5.06	45.61
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.32	27.71	23.15	18.54	84.72
Nilai Akhir dan Zona		73.43				
Kategori		C				
Opini		Kualitas Sedang				

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor penting, antara lain adanya komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam meningkatkan standar pelayanan, pelaksanaan evaluasi serta tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana pada unit layanan prioritas, serta meningkatnya responsivitas aparatur dalam menangani pengaduan masyarakat. Berbagai upaya tersebut berkontribusi terhadap terjaganya kualitas layanan sehingga nilai IKM dapat dipertahankan pada kategori Kualitas Sedang dengan tren yang meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi capaian, antara lain penilaian yang baru mencakup 7 unit layanan sehingga belum merepresentasikan keseluruhan kualitas pelayanan perangkat daerah, belum optimalnya inovasi layanan berbasis digital, masih adanya variasi kualitas pelayanan antar unit layanan, serta belum meratanya internalisasi budaya pelayanan prima di kalangan aparatur. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem, standardisasi mutu layanan, serta peningkatan kapasitas dan mindset pelayanan agar

kualitas pelayanan publik dapat meningkat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

#### **IKTS 4.2 Nilai SAKIP**

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Morowali menargetkan capaian Predikat BB, namun realisasi yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB adalah 60,73 dengan Predikat B (Baik). Dengan demikian, target kinerja Tahun 2025 belum sepenuhnya tercapai karena masih berada satu tingkat di bawah target yang ditetapkan.

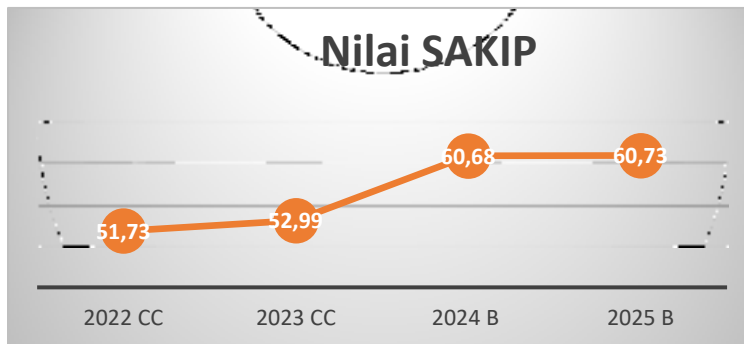
Kesenjangan antara target BB dan realisasi B pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kualitas cascading kinerja hingga level individu yang belum sepenuhnya terintegrasi.
2. Pengukuran indikator yang masih dominan pada level output dan belum optimal pada level outcome/dampak.
3. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
4. Analisis kinerja dalam LKJIP yang masih perlu diperdalam pada aspek efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Meskipun belum mencapai predikat BB, capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan Baik dan stabil, serta mampu mempertahankan predikat B sebagaimana Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah terbangun secara terstruktur, namun kualitas implementasi dan kedalaman manajemen kinerja masih memerlukan penguatan.

Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Morowali dalam periode 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada Tahun 2022 nilai SAKIP sebesar 51,73 (Predikat CC) dan meningkat menjadi 52,99 (Predikat CC) pada Tahun 2023. Peningkatan signifikan terjadi

pada Tahun 2024 dengan nilai 60,68 (Predikat B), dan pada Tahun 2025 kembali meningkat menjadi 60,73 (Predikat B).



Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Morowali dalam periode 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada Tahun

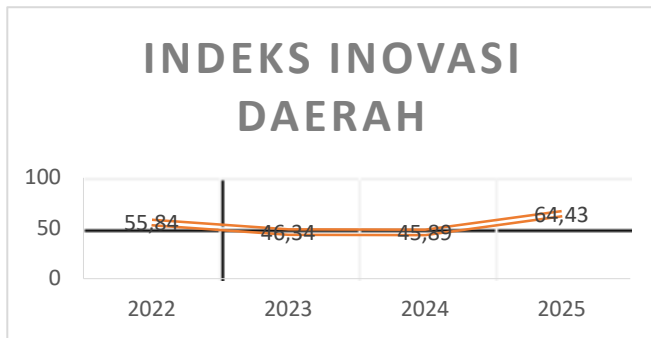
2022 nilai SAKIP sebesar 51,73 (Predikat CC) dan meningkat menjadi 52,99 (Predikat CC) pada Tahun 2023. Peningkatan signifikan terjadi pada Tahun 2024 dengan nilai 60,68 (Predikat B), dan pada Tahun 2025 kembali meningkat menjadi 60,73 (Predikat B).

Secara keseluruhan, capaian Tahun 2025 tetap menunjukkan kemajuan dibandingkan periode 2022–2023 yang masih berada pada predikat CC. Keberhasilan naik dan mempertahankan predikat B selama dua tahun terakhir menjadi fondasi penting untuk mendorong peningkatan kualitas manajemen kinerja menuju Predikat BB pada periode berikutnya melalui penguatan evaluasi internal, peningkatan kualitas indikator kinerja, serta optimalisasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi.

### **IKTS 4.1.3 Indeks Inovasi Daerah**

Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kematangan dan implementasi inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik pada aspek tata kelola, pelayanan publik, maupun daya saing daerah.

Target RPD Tahun 2025 untuk indikator ini adalah 42,50 persen dengan realisasi 64,43 sehingga capaian 151,60 dengan begitu capaian melampaui target di kategorikan sangat baik.



Secara umum, tren Indeks Inovasi Daerah selama empat tahun menunjukkan fluktuatif, dengan penurunan pada periode 2022-2024 dan

peningkatan signifikan pada tahun 2025. Jika dibandingkan antara tahun (2022) dan tahun 2025 Terjadi peningkatan sebesar 8,59 poin, secara persentase meningkat sekitar **15,39%** dibandingkan tahun 2022.

Adapun faktor pendukung capaian indeks inovasi yakni adanya perbaikan Penyusunan dokumen pendukung inovasi lebih sistematis serta koordinasi yang lebih intensif antar perangkat daerah dalam pemenuhan indikator penilaian.

NO.	NAMA KABUPATEN	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
		SKOR INDEKS SE-SULTEWA	SKOR NASIONAL	PERINGKAT	SKOR INDEKS SE-SULTEWA	SKOR NASIONAL	PERINGKAT	SKOR INDEKS SE-SULTEWA	SKOR NASIONAL	PERINGKAT	SKOR INDEKS SE-SULTEWA	SKOR NASIONAL	PERINGKAT	SKOR INDEKS SE-SULTEWA	SKOR NASIONAL	PERINGKAT	SKOR INDEKS SE-SULTEWA	SKOR NASIONAL	PERINGKAT
1	Morowali	3	12	138	4	135	3	135	3	73	135	3	175	4	205	64,43	2	71	151,60

(sumber : Bappelitbangda)

Berdasarkan gambar tabel diatas Kabupaten Morowali pada tahun 2020 berada pada peringkat 12 se-Sulawesi Tengah dan peringkat 388 nasional. Pada tahun 2021 meningkat menjadi peringkat 3 se-Sulawesi Tengah dan peringkat 135 nasional. Tahun 2022 kembali meningkat ke peringkat 2 se-Sulawesi Tengah dan peringkat 73 nasional. Tahun 2023 berada pada peringkat 3 se-Sulawesi Tengah dan peringkat 175 nasional, kemudian tahun 2024 turun ke peringkat 4 se-

Sulawesi Tengah dan peringkat 205 nasional. Pada tahun 2025 kembali meningkat signifikan menjadi peringkat 2 se-Sulawesi Tengah dan peringkat 71 nasional. Secara umum, posisi terbaik Morowali selama periode tersebut adalah peringkat 71 nasional pada tahun 2025 dan konsisten berada di 3 besar tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2021.

#### **IKTS 4.1.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan proses kerja pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui penerapan SPBE, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dilakukan secara terintegrasi dan berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, SPBE juga mendorong kolaborasi antar perangkat daerah, optimalisasi pemanfaatan data, serta peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan data yang tersedia, target indikator ditetapkan

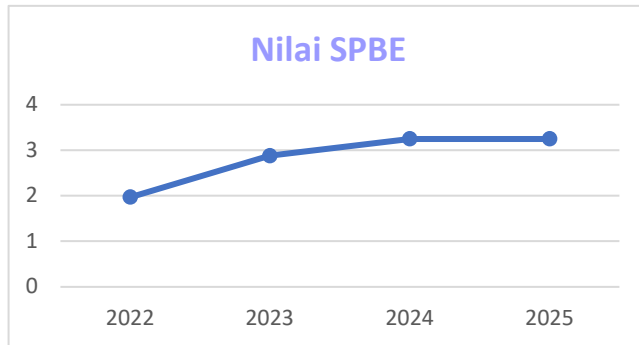
Target	Realisasi	Capaian (%)
2,00	3,25	162,50

sebesar 2,00, dengan realisasi mencapai 3,25, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 162,50%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi telah

melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,25 poin atau 62,50% di atas target. Kondisi ini mengindikasikan kinerja yang sangat baik serta adanya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator dimaksud. Dengan demikian,

capaian tersebut dapat dikategorikan sangat baik, karena telah melampaui target yang ditetapkan secara signifikan.

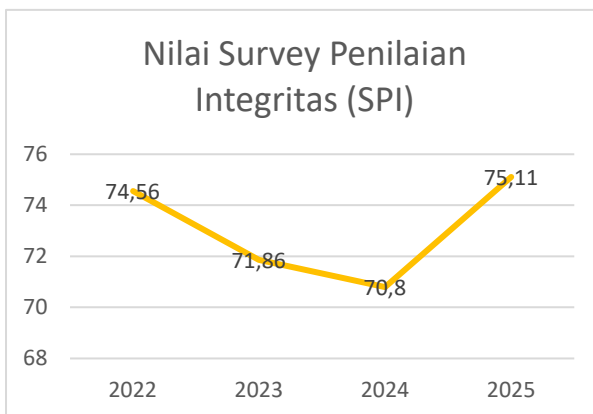
Adapun pada tahun 2025, nilai SPBE tetap sebesar 3,25, karena pelaksanaan evaluasi SPBE hanya dilakukan pada tahun 2024, dan



pada tahun 2025 tidak terdapat pelaksanaan evaluasi. Dengan demikian, nilai tahun 2025 masih mengacu pada hasil evaluasi terakhir yang dilakukan pada tahun 2024.

#### **IKTS 4.5 Survey Penilaian Integritas (SPI)**

Realisasi Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 75,11, meskipun belum mencapai target RPD sebesar 77,4, dengan tingkat capaian sebesar 97,4%. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan integritas serta penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.



Pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 2,70 poin dibandingkan tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 1,06 poin dibandingkan tahun 2023. Penurunan selama dua tahun berturut-turut ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan menjadi 75,11, atau naik sebesar 4,31 poin dibandingkan tahun 2024. Capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2022,

dengan kenaikan sebesar 0,55 poin. Hal ini mengindikasikan adanya penguatan kembali komitmen terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

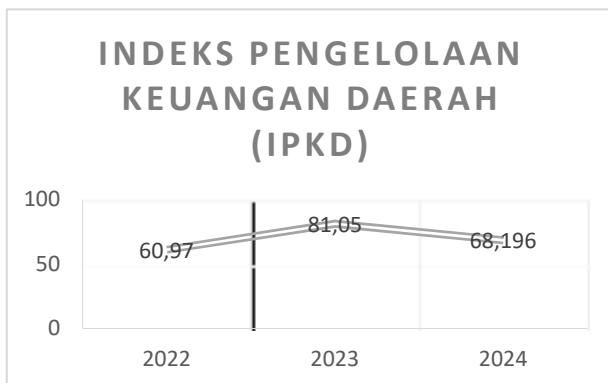
#### **IKTS 4.1.6 Indeks Pengelolaan keuangan daerah (IPKD)**

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah dalam suatu periode tertentu. IPKD digunakan untuk mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui IPKD, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kinerja perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tahun 2025 target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) ditetapkan sebesar 77,00, Perlu dijelaskan bahwa nilai 68,19 merupakan nilai IPKD Tahun 2024, yang digunakan dalam laporan Tahun 2025 karena sampai dengan penyusunan laporan ini nilai.

Target	Realisasi	Capaian (%)
77,00	69,196	88,56



Secara umum nilai IPKD Kabupaten Morowali menunjukkan tren fluktuatif. Meskipun sempat mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023, capaian tahun 2024 belum memenuhi target yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konsistensi

tata kelola keuangan daerah agar capaian IPKD pada periode berikutnya dapat lebih optimal dan stabil.

#### **IKTS 4.6 Indeks Profesionalitas ASN**

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.

Target Indeks Profesionalitas ASN ditetapkan sebesar 76,00,

Target	Realisasi	Capaian (%)
76,00	55,98	73,66

dengan realisasi sebesar 55,98, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 73,66%.

Berdasarkan capaian tersebut, realisasi belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan terdapat selisih sebesar 20,02 poin dari target. Capaian sebesar 73,66% menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN masih perlu ditingkatkan, khususnya pada aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai.

Hal ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan manajemen ASN, meskipun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Belum tercapainya target Indeks Profesionalitas ASN disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kesesuaian kualifikasi pendidikan ASN dengan jabatan yang diduduki.
2. Pemenuhan standar kompetensi jabatan yang belum merata pada seluruh perangkat daerah.
3. Tingkat kedisiplinan ASN yang belum menunjukkan peningkatan signifikan.
4. Pengembangan kompetensi ASN yang belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan jabatan dan analisis kesenjangan kompetensi.

5. Adanya ketidaksinkronan data kepegawaian antara BKPSDMD Kabupaten Morowali dengan data yang dihitung oleh BKN, sehingga mempengaruhi hasil perhitungan indeks.

Dengan demikian, diperlukan penguatan sistem merit, pembaruan dan sinkronisasi data kepegawaian secara berkala, serta peningkatan program pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan guna mendorong peningkatan Indeks Profesionalitas ASN pada periode berikutnya.



Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Morowali selama periode 2022–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif. Secara umum,

meskipun sempat mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023, capaian Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan sistem merit, peningkatan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan, serta pembaruan dan validasi data kepegawaian secara berkelanjutan guna mendorong peningkatan profesionalitas ASN pada periode selanjutnya.

#### **TUJUAN IV : Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata**

##### **IKTS 5 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)**

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan indikator baru yang mulai diimplementasikan pada tahun berjalan sebagai alat ukur persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur daerah. Indikator ini mengukur tingkat kepuasan

masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif terhadap aspek ketersediaan, kualitas, aksesibilitas, dan responsivitas layanan infrastruktur.

Dalam rangka mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan indikator tujuan berupa Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan target sebesar 60 persen.

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi IKLI mencapai angka 50 dari target yang ditetapkan sebesar 60, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 83,33%. Berdasarkan kategori penilaian kinerja dalam LKjIP, capaian ini termasuk dalam kategori “Baik”, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur, khususnya pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), belum optimal. Masyarakat masih menilai bahwa kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan layanan infrastruktur belum sepenuhnya memenuhi harapan.

Secara umum, rendahnya realisasi IKLI dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Belum terpenuhinya seluruh indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada beberapa sub-urusan Pekerjaan Umum, seperti layanan jalan, air minum, drainase, dan sanitasi.
2. Masih adanya kesenjangan kualitas infrastruktur antar wilayah.
3. Mekanisme pengelolaan pengaduan dan respons layanan yang belum sepenuhnya cepat dan terintegrasi.

Belum terpenuhinya SPM berdampak langsung pada persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan, sehingga memengaruhi nilai indeks kepuasan secara keseluruhan.

Sehingga Untuk meningkatkan capaian IKLI pada tahun mendatang, diperlukan langkah-langkah seperti :

1. Percepatan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada seluruh sub-urusan Pekerjaan Umum.
2. Peningkatan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat melalui sistem digital terintegrasi.
3. Mengintegrasikan hasil survey IKLI dalam perencanaan tahun mendatang

Berdasarkan data dari LkjIP Dinas PUPR, apabila dibandingkan dengan

Nama Kab	Target	Realisasi	Stan Nasional/
Morowali	60	50	85

Standar Nasional / Provinsi

sebesar 85, realisasi IKLI

Kabupaten Morowali masih

berada 35 poin di bawah standar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kondisi pelayanan infrastruktur daerah dengan standar yang diharapkan secara nasional/provinsi.

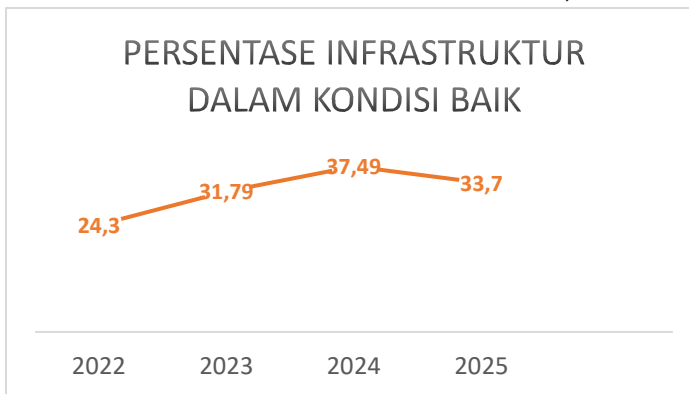
### **IKSS 5.1 Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik**

Indikator Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik digunakan untuk mengukur tingkat kualitas infrastruktur daerah yang memenuhi standar teknis dan layak fungsi. Infrastruktur dimaksud meliputi jalan, jembatan, drainase, dan sarana prasarana pekerjaan umum lainnya sesuai kewenangan daerah.

Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 33,70%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 26,50%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 124,79%. Berdasarkan kategori penilaian kinerja dalam LKjIP, capaian ini termasuk dalam kategori Sangat Baik, karena melebihi target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur daerah yang cukup signifikan dibandingkan target perencanaan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembangunan infrastruktur pada tahun berjalan.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa:



a. Tahun 2022 – 2024 menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari 24,30% menjadi 37,49%.

b. Tahun 2025 mengalami penurunan

dibandingkan Tahun 2024, namun tetap lebih tinggi dibandingkan capaian Tahun 2022 dan 2023.

c. Meskipun terjadi penurunan sebesar 3,79 poin dari tahun sebelumnya, realisasi Tahun 2025 tetap melampaui target yang telah ditetapkan.

Penurunan pada Tahun 2025 dapat disebabkan oleh bertambahnya panjang/volume infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah, perubahan metode penilaian kondisi, atau meningkatnya kebutuhan pemeliharaan akibat faktor usia dan beban infrastruktur.

## **IKSS 5.2. Tingkat ketaatan terhadap rencana tata ruang Wilayah (RTRW)**

Indikator Tingkat Ketaatan terhadap RTRW bertujuan mengukur kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen RTRW yang telah ditetapkan. Sampai dengan Tahun 2024, Pemerintah Daerah belum melakukan pengukuran kuantitatif terhadap indikator ini, sehingga capaian belum dapat dihitung.

Meskipun demikian, Pemerintah Daerah telah melakukan langkah strategis untuk meningkatkan ketaatan tata ruang melalui:

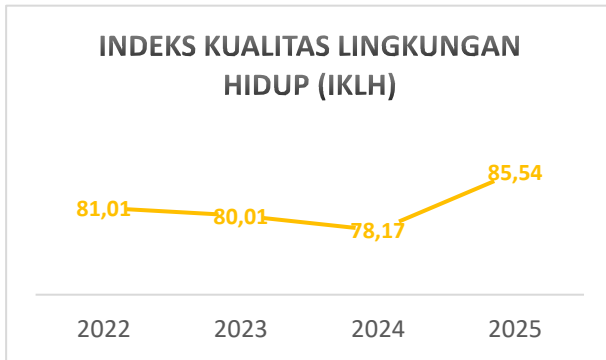
1. Revisi dan Peninjauan Kembali RTRW dengan alokasi anggaran Rp1.349.517.000 guna menyesuaikan Perda RTRW Tahun 2019 yang wajib direvisi pada Tahun 2024.
2. Penyusunan dan penyelesaian RDTR (Wosu, Bahonsuai, Bahodopi, dan Lantula Jaya) dengan alokasi anggaran Rp1.750.457.000 sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih detail.

Meskipun realisasi belum terukur, upaya RTRW dan RDTR menunjukkan adanya upaya nyata penyelenggaraan urusan penataan ruang, namun ke depan diperlukan sistem pengukuran yang terstandar agar capaian indikator dapat dievaluasi secara kuantitatif.

### **IKSS 5.3.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Pada Tahun 2025, realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Morowali mencapai 85,54, melampaui target sebesar 83,45, dengan tingkat capaian 102,51%. Capaian ini termasuk dalam kategori sangat baik, yang menunjukkan bahwa kondisi lingkungan hidup daerah secara umum berada dalam status tidak tercemar dan terkendali.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program pengendalian pencemaran, pengelolaan lingkungan, serta upaya pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.



Berdasarkan data tersebut, perkembangan IKLH Kabupaten Morowali menunjukkan tren sebagai berikut:

1. Tahun 2022–2024 terjadi penurunan bertahap dari 81,01 menjadi 78,17.

Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup, yang dapat dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan, pertumbuhan kawasan industri, serta meningkatnya volume limbah dan emisi.

2. Tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan menjadi 85,54 atau naik sebesar 7,37 poin dibandingkan Tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas lingkungan hidup yang cukup signifikan.

Peningkatan tajam pada Tahun 2025 mencerminkan efektivitas program pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, serta penguatan pengawasan lingkungan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

**TUJUAN V : Menciptakan tatanan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah**

**IKTS 6 Indeks Rasa Aman**

Indikator Indeks Rasa Aman pada tahun pelaporan ditetapkan dengan target sebesar 80 poin. Namun demikian, sampai dengan akhir tahun anggaran, pengukuran terhadap indikator tersebut belum dilaksanakan sehingga data realisasi belum tersedia dan capaian kinerja tidak dapat dihitung. Selain itu, dalam dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 indikator ini sudah tidak lagi digunakan sebagai indikator kinerja daerah.

Belum dilaksanakannya pengukuran Indeks Rasa Aman disebabkan oleh belum tersusunnya instrumen dan metodologi survei yang terstandar, keterbatasan dukungan sumber daya manusia, serta belum adanya kesiapan teknis meskipun indikator telah dicantumkan dalam dokumen perencanaan.

Kondisi tersebut berdampak pada tidak tersedianya data untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program ketenteraman dan ketertiban umum, terbatasnya dasar pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy), serta berkurangnya kualitas pengukuran outcome pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

**IKSS 6.1 Angka Kriminalitas**

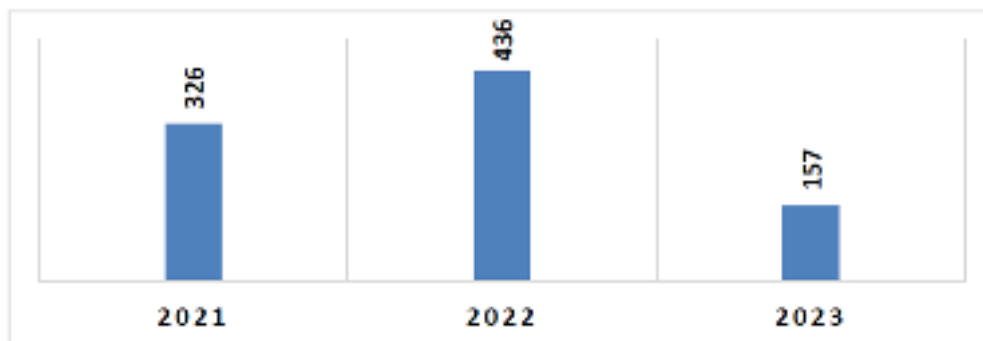
Target indikator Angka Kriminalitas pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 17,50 persen. Namun demikian, sampai dengan penyusunan laporan ini, data realisasi Tahun 2025 belum dirilis sehingga capaian kinerja tahun berjalan belum dapat dihitung.

Berdasarkan data historis dalam dokumen RKPD, pada Tahun 2023 indikator angka kriminalitas sempat mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021 dan Tahun 2022. Meskipun demikian, target RKPD Tahun 2024 tetap ditetapkan sebesar 17,50 persen, dan sampai dengan akhir Tahun 2024 capaian indikator ini mencapai 9,21

persen, atau sebesar 190,01 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasi berada jauh di bawah batas target yang telah ditentukan (semakin rendah angka kriminalitas, semakin baik capaian kinerja).

Jumlah tindak pidana menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Morowali pada periode Tahun 2021–2023 menunjukkan tren penurunan setiap tahunnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Morowali cenderung membaik dalam tiga tahun terakhir.

Meskipun capaian Tahun 2025 belum tersedia, tren penurunan jumlah tindak pidana pada periode sebelumnya serta capaian Tahun 2024 yang melampaui target menjadi indikasi positif terhadap keberlanjutan kinerja urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Namun demikian, evaluasi final tetap menunggu rilis resmi data Tahun 2025 dari instansi berwenang.

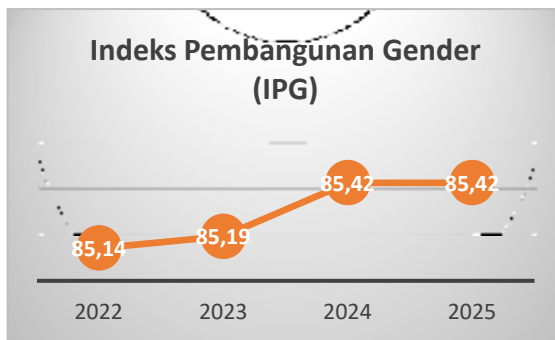


(Sumber data Buku RKPD 2026)

### **IKSS 6.1.2 Indeks Pembangunan Gender**

Target Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025 ditetapkan sebesar 88, dengan realisasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik per 21 April 2025 sebesar 85,42, sehingga capaian kinerja mencapai 75,12 persen dari target yang ditetapkan

Data tersebut menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Morowali mengalami peningkatan secara bertahap pada periode 2022–2024, namun pada Tahun 2025 relatif stagnan dibandingkan Tahun 2024. Secara tren, capaian IPG berada pada kisaran 85 poin dalam empat



tahun terakhir, yang mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan relatif terkendali, namun belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Secara umum, meskipun capaian belum memenuhi target, stabilitas nilai IPG dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pembangunan gender di Kabupaten Morowali tetap terjaga, namun memerlukan akselerasi kebijakan untuk mendorong peningkatan yang lebih optimal.

### **IKTS 7.1 Indeks Rawan Bencana**

Indeks Rawan Bencana (IRB) adalah indikator komposit yang menggambarkan tingkat kerawanan suatu wilayah terhadap potensi bencana alam maupun non-alam. Indeks ini umumnya disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan kombinasi:

1. Ancaman (*hazard*) → potensi kejadian (banjir, longsor, gempa, kebakaran hutan, dll.)
2. Kerentanan (*vulnerability*) → kondisi sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan masyarakat
3. Kapasitas (*capacity*) → kemampuan daerah dalam mitigasi dan penanggulangan

Semakin tinggi nilai IRB, semakin tinggi tingkat kerawanan suatu daerah. Berdasarkan dokumen RPD, satuan indikator Indeks Rawan Bencana (IRB) ditetapkan dalam bentuk *indeks* dengan target berada pada Level 3. Adapun hasil pengukuran IRB Kabupaten Morowali menunjukkan nilai sebesar 230. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Morowali memiliki tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi, baik dari aspek ancaman (*hazard*) seperti banjir dan

longsor, maupun dari aspek kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan

Namun demikian, terdapat ketidaksesuaian dalam perumusan indikator pada dokumen perencanaan, dimana satuan indikator ditetapkan sebagai *indeks*, tetapi target dinyatakan dalam bentuk *level*. Sementara itu, hasil pengukuran yang dikeluarkan oleh instansi penanggung jawab (BPBD) disajikan dalam bentuk nilai indeks (angka kuantitatif), bukan dalam bentuk level.

Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penyesuaian dalam dokumen perencanaan pada periode berikutnya.

### **IKSS 6.2.1 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana**

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan komponen penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan atau kapasitas suatu daerah dalam menghadapi ancaman bencana. IKD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana.

Nilai IKD memiliki keterkaitan langsung dengan Indeks Risiko Bencana (IRB), karena komponen ketahanan daerah menjadi salah satu variabel dalam perhitungan tingkat risiko bencana. Semakin tinggi nilai IKD, maka kapasitas daerah dalam menghadapi bencana semakin baik, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat risiko bencana (IRB). Sebaliknya, rendahnya nilai IKD berpotensi meningkatkan nilai IRB karena kapasitas penanggulangan bencana dinilai belum optimal.

BNPB telah melakukan verifikasi dan finalisasi data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2025 untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 di tingkat kabupaten/kota :

Kabupaten / Kota	IKD	IRB
Banggai	0,31	249,33
Banggai Kepulauan	Tidak menilai	197,45
Banggai Laut	0,20	209,98
Buol	0,25	242,93
Donggala	0,44	199,74
Kota Palu	0,74	132,58
Morowali	0,35	230,08
Morowali Utara	0,30	232,94
Parigi Mautong	0,48	121,08
Poso	0,43	159,09
Sigi	0,55	126,74
Tojo Una-una	0,30	264,05
Toli-toli	0,44	189,16

### **IKSS 6.2.1 Indeks Desa Membangun (IDM)**

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga dimensi utama, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin maju dan mandiri, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Secara konseptual, peningkatan nilai IDM mencerminkan keberhasilan pembangunan desa yang terintegrasi, antara lain melalui peningkatan akses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan permukiman), penguatan aktivitas ekonomi masyarakat desa, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Capaian indikator IDM menggambarkan bahwa pembangunan desa di Kabupaten Morowali telah menunjukkan arah yang positif, ditandai dengan semakin meningkatnya status desa berkembang

menuju desa maju dan mandiri. Hal ini mengindikasikan adanya sinergi antara kebijakan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta dukungan program nasional dalam mendorong ketahanan sosial, pertumbuhan ekonomi lokal, dan kualitas lingkungan desa.

Namun demikian, masih terdapat tantangan pada beberapa desa dengan status tertinggal atau berkembang, yang umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur dasar, kapasitas kelembagaan desa, serta akses ekonomi masyarakat.

Target Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,6908, dengan realisasi mencapai 0,94244, sehingga capaian kinerja sebesar 136,43 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan desa telah melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Status Desa	Desa
Mandiri	41
Maju	23
Berkembang	62
Tertinggal	0
Sangat Tertinggal	0

Berdasarkan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali, dari total 126 desa, klasifikasi status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) adalah sebagai berikut : 41 Desa Mandiri

(32,54%), 23 Desa Maju (18,25%), 62 Desa Berkembang (49,21%) 0 Desa Tertinggal (0%) dan 0 Desa Sangat Tertinggal (0%).

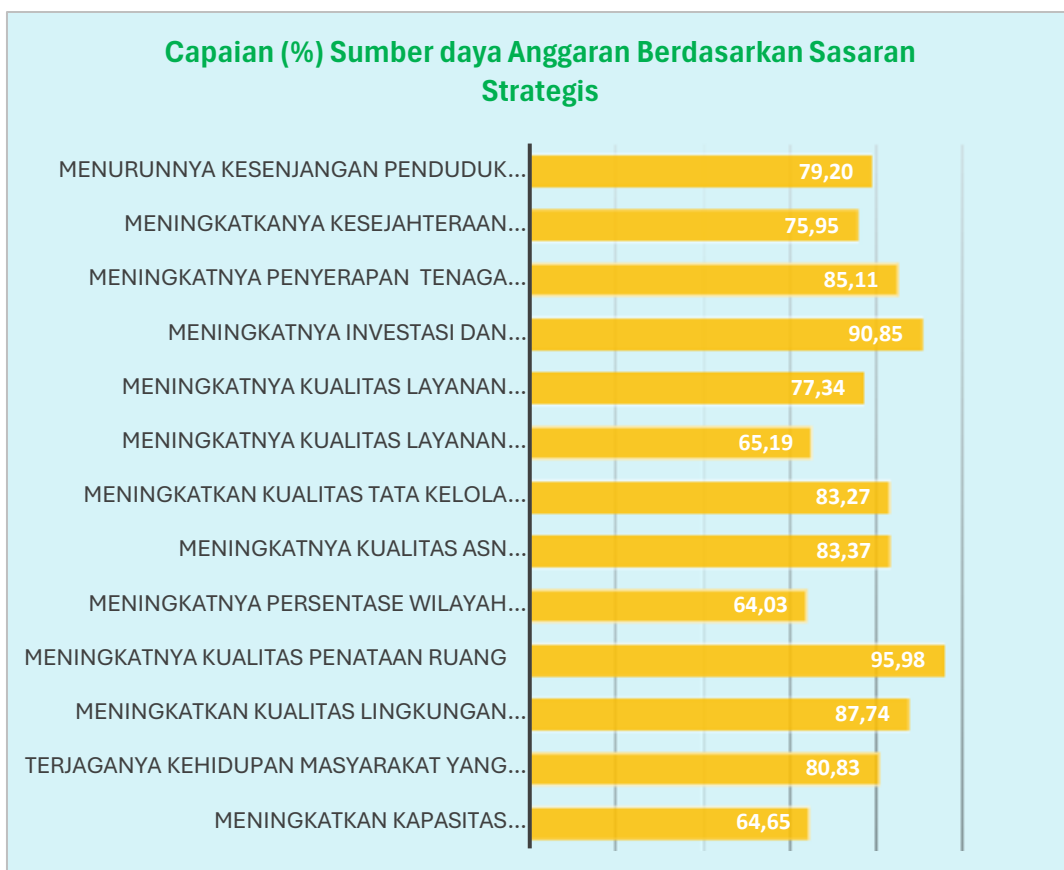
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Morowali telah berada minimal pada kategori Desa Berkembang, serta tidak terdapat lagi desa dengan status tertinggal maupun sangat tertinggal. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pembangunan desa yang konsisten dalam meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Proporsi Desa Mandiri yang mencapai 32,54 persen menunjukkan capaian yang cukup signifikan dalam mendorong kemandirian desa. Namun demikian, masih terdapat 49,21 persen desa dengan status berkembang, yang menunjukkan perlunya penguatan

intervensi pembangunan, terutama pada aspek penguatan ekonomi desa, peningkatan kualitas pelayanan dasar, dan kapasitas kelembagaan.

### C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara pagu anggaran, realisasi anggaran, dan capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana penggunaan sumber daya daerah telah menghasilkan kinerja yang optimal sesuai target yang ditetapkan. Berikut grafik capaian Anggaran tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis :



Grafik tersebut menggambarkan Capaian (%) Sumber Daya Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis. Secara umum, tingkat capaian anggaran menunjukkan kinerja yang cukup baik karena sebagian besar sasaran berada pada kisaran 75%–95%.

Capaian tertinggi terdapat pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang sebesar 95,98%, diikuti oleh Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah sebesar 90,85%, serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan sebesar 87,74%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dan pemanfaatan anggaran pada sektor-sektor tersebut relatif optimal.

Sementara itu, beberapa sasaran masih berada pada capaian menengah, seperti Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin (79,20%), Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat (75,95%), dan Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan (77,34%).

Adapun capaian terendah terdapat pada Meningkatnya Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Baik (64,03%), Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana dan Kemajuan Pembangunan Desa (64,65%), serta Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan (65,19%). Hal ini menunjukkan perlunya perhatian dan optimalisasi pengelolaan anggaran pada sektor-sektor tersebut agar target strategis dapat tercapai lebih maksimal.

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya anggaran sudah cukup efektif, namun masih terdapat beberapa bidang prioritas yang memerlukan penguatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar capaian lebih merata di seluruh sasaran strategis.

Berdasarkan data pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara capaian anggaran dan capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Namun demikian, dalam pelaporan tahun berjalan terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dirilis secara resmi oleh instansi pembina atau lembaga statistik terkait, sehingga mempengaruhi persentase capaian kinerja pada sasaran tertentu. Kondisi ini menyebabkan analisis efisiensi pada beberapa sasaran belum dapat dihitung secara komprehensif dan masih bersifat sementara (provisional), menunggu rilis data final.

Selain itu, berdasarkan pemetaan program dan kegiatan dalam dokumen RPD, diketahui bahwa terdapat sejumlah program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian masing-masing sasaran strategis. Dengan adanya keterkaitan (*link and match*) antara sasaran strategis dan program pendukung tersebut, maka alokasi dan realisasi anggaran dapat diidentifikasi. Berikut tabel capaian perbandingan antara capaian anggaran dan capaian kinerja berdasarkan Sasaran strategis :

Tabel perbandingan antrana capaian kinerja dan Anggrana berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Capaian Anggaran(%)	Capaian Kinerja (%)
1	Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin	79,20	132,13
2	Meningkatkanya Kesejahteraan Masyarakat	75,95	47,25
3	Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	85,11	59,5
4	Meningkatnya investasi dan pendapatan daerah	90,85	94,11
5	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	77,34	131,17
6	Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan	65,19	116,14
7	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	83,27	114,35
8	Meningkatnya Kualitas ASN berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, kompetensi dan Kinerja ASN	83,37	73,66
9	Meningkatnya persentase wilayah dengan infasturktur baik	64,03	124,79
10	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	95,98	Belum rilis
11	Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	87,74	104,96
12	Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram damai dan harmonis	80,83	25,06
13	Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah dan kemajuan pembangunan desa	64,65	134,52

Berdasarkan data pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara capaian anggaran dan capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Secara umum, efisiensi dinilai baik apabila capaian kinerja lebih tinggi atau minimal sebanding dengan persentase serapan anggaran. Namun demikian, dalam pelaporan tahun berjalan terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dirilis secara resmi, sehingga mempengaruhi persentase capaian kinerja pada sasaran tertentu.

Beberapa sasaran menunjukkan capaian kinerja yang jauh melampaui capaian anggaran, antara lain:

- 🏠 Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin (79,20% anggaran; 132,13% kinerja)
- 🏠 Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan (77,34% anggaran; 131,17% kinerja)
- 🏠 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan (65,19% anggaran; 116,14% kinerja)
- 🏠 Meningkatnya Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Baik (64,03% anggaran; 124,79% kinerja)
- 🏠 Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana dan Kemajuan Pembangunan Desa (64,65% anggaran; 134,52% kinerja). Pada sasaran tersebut, capaian output dan outcome melampaui target meskipun tingkat serapan anggaran tidak maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya tergolong sangat efisien, karena hasil yang diperoleh lebih besar dibandingkan proporsi anggaran yang digunakan.

Sasaran dengan Efisiensi Proporsional :

- 🏠 Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah (90,85% anggaran; 94,11% kinerja)
- 🏠 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik (83,27% anggaran; 114,35% kinerja)
- 🏠 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup (87,74% anggaran; 104,96% kinerja). Pada sasaran ini, capaian kinerja relatif

sebanding atau lebih tinggi dari serapan anggaran, sehingga dapat dikategorikan efisien dan proporsional.

Beberapa sasaran menunjukkan capaian kinerja lebih rendah dibandingkan serapan anggaran, antara lain:

- 🏗️ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (75,95% anggaran; 47,25% kinerja)
- 🏗️ Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja (85,11% anggaran; 59,5% kinerja)
- 🏗️ Meningkatnya Kualitas ASN (83,37% anggaran; 73,66% kinerja)
- 🏗️ Terjaganya Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Tenram (80,83% anggaran; 25,06% kinerja). Namun demikian, perlu dijelaskan bahwa rendahnya capaian kinerja pada beberapa sasaran tersebut bukan sepenuhnya mencerminkan rendahnya hasil pembangunan, melainkan disebabkan oleh belum dirilisnya nilai beberapa indikator kinerja utama oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, persentase capaian kinerja yang tercantum masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami peningkatan setelah seluruh data indikator tersedia.

Sasaran dengan Data Kinerja Belum Tersedia, yakni :

- 🏗️ Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang (95,98% anggaran; capaian kinerja belum rilis). Sasaran ini, analisis efisiensi belum dapat dilakukan secara komprehensif karena data capaian kinerja belum tersedia.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat: Kompleks Kota Terpadu Mandiri – Bahomohoni Morowali

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Morowali.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Buana, 13 Maret 2026

Inspektur

**ASDIAR W. MARUF, SE., M.Si., MH.Kes**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197201121994031008



# PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

## INSPEKTORAT DAERAH

Alamat: Kompleks Kota Terpadu Mandiri – Bahomohoni Morowali

---

Nomor : 700.1.2.1/024/R.LAKIP/RHS/ITDAKAB/III/2026 Bungku, 13 Maret 2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Hasil Reviu Atas Laporan  
Kinerja Instansi Pemerintahan  
Kabupaten Morowali untuk Tahun  
Anggaran 2025

Yth. Bupati Morowali

di –

Tempat

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

### 1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

### 2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- c. Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Nomor: 000.1.2.3/01882/ST/ITDAKAB/II/2026 Tanggal 05 Maret 2026

### **3. Waktu Pelaksanaan Reviu**

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali untuk Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan mulai tanggal 05 s/d 13 Maret 2026.

### **4. Tujuan dan Sasaran Reviu**

Tujuan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Sedangkan sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2026.

### **5. Ruang Lingkup Reviu**

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format laporan, mekanisme penyusunan, dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2025.

### **6. Simpulan dan Rekomendasi**

#### **6.1. Simpulan**

##### **6.1.1. Format**

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Pemerintah (Laporan Kinerja/LKj) Kabupaten Morowali Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

6.1.1.1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting IP;

6.1.1.2. Laporan Kinerja tidak disusun secara sistematis sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6.1.1.3. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi Target Kinerja yang sesuai dengan Penetapan Kinerja;

6.1.1.4. Tabel yang mendukung informasi telah disajikan dalam badan laporan;

6.1.1.5. Laporan Kinerja telah menyajikan upaya-upaya perbaikan kedepan;

6.1.1.6. Laporan Kinerja telah menyajikan akuntabilitas keuangan.

### **6.1.2. Mekanisme Penyusunan**

Kesimpulan terhadap mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

6.1.2.1. Laporan Kinerja IP telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu;

6.1.2.2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung data yang memadai;

6.1.2.3. Laporan Kinerja IP telah menyajikan informasi target kinerja;

6.1.2.4. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja belum didukung SOP yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;

6.1.2.5. Telah terdapat daftar penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;

6.1.2.6. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait;

6.1.2.7. Laporan Kinerja IP merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya.

### 6.1.3. Substansi

Kesimpulan terhadap Substansi laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 6.1.3.1. Terdapat ketidaksesuaian tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja yakni meningkatnya kualitas layanan kesehatan indikator indeks pendidikan pada Halaman 2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang seharusnya sasaran meningkatnya kualitas pendidikan.
- 6.1.3.2. Terdapat ketidaksesuaian nilai target Indikator kinerja tujuan/sasaran dalam LKJ dengan target indikator tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja yang berbeda yaitu:
  - a. Indeks gini rasio
  - b. Tingkat pengangguran terbuka
  - c. Indeks kesehatan
  - d. Inflasi
  - e. Pendapatan perkapita
  - f. Nilai SPBE
  - g. Indeks inovasi daerah
  - h. Persentase infrastruktur dalam kondisi baik
  - i. Tingkat ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)
  - j. Indeks kualitas lingkungan hidup
  - k. Indeks pembangunan gender
  - l. Indeks desa membangun desa
  - m. Indeks ketahanan daerah
- 6.1.3.3. Terdapat ketidakselarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam tujuan/sasaran LKJ dengan dokumen RPD yaitu:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama LKJ	Indikator Kinerja Utama yang di tetapkan
1	Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin	Indeks Gini Rasio	Indeks Gini Kabupatem
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks Kesehatan Stunting
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pengelolaan Keuanga Daerah	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Indeks Profesional ASN	Tidak ada
		Tidak ada	Indeks Inovasi daerah

6.1.3.4. Perbandingan data kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir sudah sesuai.

6.1.3.5. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) secara umum telah memenuhi syarat **SMART**

## 6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali:

1. Dalam hal format laporan kinerja agar disusun secara sistematis sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Dalam hal mekanisme penyusunan Laporan Kinerja agar membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan Laporan Kinerja yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
3. Dalam hal Subtansi, agar:
  - a) Melakukan koreksi penulisan tujuan/sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan halaman 2 laporan LKJIP.

- b) Menyesuaikan nilai target Indikator kinerja tujuan/sasaran dalam LKJ dengan target indikator tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
- c) Menyelaraskan Indikator Kinerja Utama tujuan/sasaran dalam LKj dengan tujuan/sasaran yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Demikian laporan hasil reuiu ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.



INSPEKTUR,

**ASHAR M. MARUF, SE., M.Si., MH.Kes**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197201121994031008